



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : **BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**
UNIT KERJA : **ANGGOTA BIDANG ADMINISTRASI DAN KEUANGAN**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SISWANTO**
2. Jabatan : **KEPALA BIRO KEUANGAN**
3. NHK : **50837**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.503.000.000

1. Tanah Seluas 65 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI
Rp. 70.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 66 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 65 m2/65 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 183.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 110.000.000

1. MOBIL, AVANZA MINIBUS Tahun 2012, HADIAH Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, HONDA LEGENDA SEPEDA MOTOR Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 79.000.000

D. SURAT BERTHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.207.169.897



F. HARTA LAINNYA	Rp.	1.114.663.035
Sub Total	Rp.	4.013.832.932
III. HUTANG	Rp.	1.312.707.969
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.701.124.963

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.